

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Mulyadi (2007:2) “menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Halim (2001) “analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian”. Pada penelitian ini yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi, sedangkan rasio pertumbuhan dan keserasian tidak digunakan. Untuk itu, penjelasan terkait hanya pada rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi.

Menurut Bastian (2001:329), “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”. Menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi dan organisasi”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja

yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

2.1.2 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2004,pasal 26 ayat (1) keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat di jadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” sedangkan menurut keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002, yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) “ Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu : 1. Hak Daerah, 2 Kewajiban Daerah 3. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Disamping memiliki unsur-unsur pokok diatas, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu : suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

2.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Sedarmayanti (2003 : 64) ”Kinerja (performance) diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan yang dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah demi mewujudkan sasaran, visi dan misi. Kinerja keuangan ini adalah ukuran yang menggunakan indikator keuangan sehingga diperlukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.

2.2 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Menurut Helfert (1982) dalam Mohamad Mahsun (2012:135), “Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya”. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2007:L-4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor (Abdul Halim 2007:L-4).

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah :

2.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat daerahnya (Halim,2008:232). Rasio kemandirian keuangan daerah ini diukur dengan menggunakan

$$KKD = \frac{\text{Total Penerimaan PAD}}{\text{Total Bantuan Daerah dan Pinjaman}} \times 100$$

Menurut Purba (2012), untuk mengetahui hubungan situasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada empat pola hubungan seperti yang ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 2.1
Pola Hubungan, Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Kemampuan Daerah	Rasio Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Purba, 2012

- a Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

- d Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.2.2 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah PAD yang telah ditargetkan. Menurut Mahsun (2006, 187) rasio ini diukur dengan perbandingan :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 2.2
Tingkat Efektivitas PAD

Efektivitas Keuangan Daerah	Rasio Efektivitas
Efektif	>100%
Efektif berimbang	=100%
Tidak Efektif	<100%

Sumber : Mashun, 2006:187

2.2.3 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Tingkat Efisiensi PAD

Kriteria Efisiensi	Persentase efisiensi
100% keatas	Tidak efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mashun, 2006:187

2.2.4 Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil. Formula pengukuran rasio ini diformulasikan seperti :

$$\text{Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100$$

$$\text{Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100$$

2.2.5 Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2008, 241), rasio pertumbuhan (*Growht ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari period ke periode berikutnya.

Pengukuran tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dihitung menggunakan formula :

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_{t-(t-1)}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100$$

Pengukuran tingkat pengeluaran Daerah dapat diketahui melalui formula :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin}_{t-(t-1)}}{\text{Belanja Rutin}_{t-1}} \times 100$$

Pertumbuhan Belanja Pembangunan =

$$\frac{\text{Belanja Pembangunan}_{t-(t-1)}}{\text{Belanja Pembangunan}_{t-1}} \times 100$$

Dimana :

t = Tahun Berjalan

t-1 = Tahun Sebelumnya

Rasio ini akan menyajikan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah serta pengambilan keputusan.

2.3 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.4
Peneliti Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Anis Karlina, (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015	(1) Dilihat dari Varians Pendapatan Daerah selama Tahun 2012-2015, secara umum dapat dikatakan kurang baik, (2) Dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Dearah selama tahun 2012-2015 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Surabaya dapat dikatakan sangat baik, (3) Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kota Surabaya masuk kedalam kategori tinggi dan pola hubungan deleglatif yang artinya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sangat rendah, (4) dilihat dari Rasio pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun 2012-2015, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam hal pertumbuhan

			pendapatan dikatakan pertumbuhannya positif, karena setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 jumlah realisasi pendapatan daerah baik dari PAD maupun TPD selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, (5) Dilihat dari varuans belanja daerah selama tahun 2012-2015, secara umum dapat dikatakan baik, (6) Dilihat dari keserasian belanja daerah selama tahun 2012-2015, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal, (7) Dilihat dari Efisiensi Belanja daerah, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Surabaya tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan efisiensi belanja.
2.	MuhammadZuhri, Ahmad Soleh (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur	(1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instrukturif, karena masih tergolong dalam interval

		<p>0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan 2014 rasionya masing-masing sebesar: 1,89%; 1,84%; 2,29%; dan 3,74%. (2) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2011, 2013 dan 2014 berjalan Kurang Efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75%-89% secara berturut-turut sebesar 77,7%, 87,1% dan 88%, namun pada tahun 2012 berjalan sangat efektif dengan nilai rasio mencapai 107,3%. (3) Rasio Aktivitas dari sisi Rasio Belanja Operasi tergolong baik yakni dengan nilai rasio antara 50%-100% atau dengan nilai rata-rata 76,7% per tahun sedangkan Rasio Belanja Modal tergolong tidak baik karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% atau dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 23,2% per tahun). (4) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kaur mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan kategori pertumbuhan rendah (14,26%) untuk tahun 2012, namun rasio pertumbuhan pada tahun 2013 mengalami</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>peningkatan yakni dengan kategori pertumbuhan sedang (32,86%), dan di tahun 2014 kembali mengalami peningkatan dengan kategori pertumbuhan tinggi (88,53%) sehingga selama periode pengamatan, pertumbuhan tersebut tergolong pertumbuhan sedang dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 45,22% per tahun.</p>
3.	Wahidah Niken Kusumadewi, Ventje Ilat (2016)	Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014	<p>1. Berdasarkan kinerja pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dapat dinilai berada pada tingkat kemampuan yang kurang. Hal ini dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan masih relatif kecil. Pemerintah daerah belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dengan kata lain, masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.</p> <p>2. Berdasarkan kinerja belanja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dapat dinilai belum optimal dalam keserasian belanja. Ini menunjukan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan porsi belanjanya untuk belanja operasi dari pada belanja modal.</p>

4.	Joko Pramono (2014)	Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah kota Surakarta)	<p>(1). Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian.</p> <p>(2). Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83 % (2010) dan 24,44% (2011).</p> <p>(3). Pemkot Surakarta dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, yakni sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011). Di lain pihak rasio belanja modal terhadap APBD juga masih rendah yaitu sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011)</p> <p>(4). Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang sudah baik adalah pada aspek efisiensi, efektivitas, pertumbuhan dan kemampuan membayar pinjaman.</p>
----	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>(5). Pemkot Surakarta sangat efisien di dalam mengelola PAD nya, hal ini bisa di lihat dari hasil perhtingan rasio efisiensi sebesar 27,95% (2010) dan 14,15% (2011)</p> <p>(6). Efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola PAD nya mengalami peningkatan dari efektif menjadi sangat efektif, yakni dari 94,81% (2010) meningkat menjadi 102,79% (2011).</p> <p>(7). Jumlah pendapatan dan jumlah PAD mengalami pertumbuhan yang positif, untuk pendapatan naik sebesar 19,92%, sedangkan PAD mengalami kenaikan cukup tinggi yakni sebesar 58,93%. Di lain pihak belanja operasi naik sebesar 14,58% dan belanja modal naik sangat tinggi sebesar 61,03%.</p> <p>(8). Pemkot Surakarta memiliki kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman, karena hasil perhitungan rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011).</p> <p>(9). Kinerja keuangan dari Pemkot Surakarta</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			untuk tahun 2010 dan 2011 ditinjau dari aspek pengelolaan pendapatan asli daerahnya sudah sangat efektif dan efisien.
5.	Anim Rahmayati (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013	<p>1. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah dengan rasio kemandirian daerah dibawah 25% yakni rata-rata hanya sebesar 15,31%.</p> <p>2. Efektivitas pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam mengelola pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari 107,71% tahun 2011 menjadi 116,44% pada tahun 2012. Walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan yakni sebesar 113,20%, tetapi masih termasuk kriteria efektif.</p> <p>3. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi sebesar 3,71% pada tahun 2011, 2,60% pada tahun 2012 dan 2,65% pada tahun 2013.</p> <p>4. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo</p>

			<p>dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, yakni sebesar 89,61% pada tahun 2011, 80,42% pada tahun 2012 dan 83,41% pada tahun 2013. Di lain pihak rasio belanja modal terhadap APBD juga masih sangat rendah yakni sebesar 10,92% pada tahun 2011, 19,53% pada tahun 2012 dan 16,36% pada tahun 2013.</p> <p>5. Jumlah pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang sangat positif signifikan pada tahun 2012 sebesar 71,53%, walaupun pada tahun 2013 turun drastis menjadi 16,98%. Begitu juga dengan jumlah pendapatan pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 19,90% kemudian turun menjadi 12,17%.</p> <p>6. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio DSCR yang rata-rata diatas 2,5.</p>
6.	Msy. Mikial (2012)	Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin	Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin sudah efektif. Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin sebagian besar

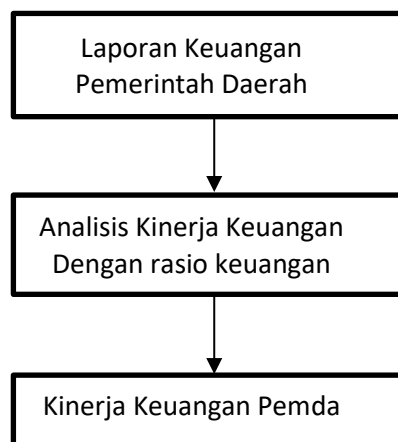
			diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin dan sisanya baru diperuntukkan belanja pembangunan.
7.	Mhd. Ichwan Cahyadi (2012)	Analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah kepulauan meranti	<p>1. Dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kategori sangat kurang dalam Kemandirian Keuangan namun pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berpotensi untuk mensejahterakan masyarakatnya karena mempunyai sumber daya alam yang besar</p> <p>2. Rasio Efektifitas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti semakin meningkat yaitu pada tahun anggaran 2010 berada pada kategori efektif meningkat menjadi sangat efektif pada tahun anggaran 2011.</p> <p>3. Rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat efisiensi dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p> <p>4. Kondisi rasio aktivitas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar sudah diprioritaskan untuk kebutuhan belanja pembangunan</p>

			5. Pertumbuhan APBD pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan menunjukkan pertumbuhan yang positif
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4 Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar 2.5 di atas perhitungan pada kinerja keuangan dan kemampuan daerah, pada perhitungan ini, penulis menggunakan data laporan APBD yang telah di dapat dari www.djpk.kemenkeu.go.id kemudian dihitung dengan menggunakan rasio keuangan dan kemampuan daerah sehingga akan menghasilkan hasil yang akan dibandingkan dengan standar yang ada.